

el Penelitian  
a Rutin Unand Tahun 2001  
trak No. 01/RUTIN/V/2001

erencanaan Pembangunan Regional Sumatera Barat Pasca Otonomi  
Daerah: Suatu Kajian Deskriptif Atas Orientasi Kebijakan

Fetrian, S.IP

Chandra

Ranny Emilia, M.Phil

itas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Departemen Pendidikan Nasional  
Lembaga Penelitian Universitas Andalas  
Dibiayai dengan Dana Rutin Universitas Andalas  
Padang 2001

## ABSTRAK

mulai diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2000 membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah akan menjadi fungsi strategis pemerintah daerah untuk menggantikan posisi Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Perencanaan pembangunan dengan cara pandang regional turut pula menggantikan model sektoral yang berorientasi pada proyek-proyek yang perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan serta pengawasannya berasal dari pusat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyidik gambaran perencanaan pembangunan kewilayahan Propinsi Sumatera Barat. Mengingat perkembangannya yang sangat pesat dan dikaitkan pula dengan dorongan kebutuhan internal Sumatera Barat maka perencanaan yang mengarah pada wilayah Sumatera Timur menjadi prioritas.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengumpulkan informasi relevan dari dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 – 2005 dan Program Pembangunan Daerah Propinsi (Propeda) 2001-2005.

Interpretasi atas informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa identifikasi perencanaan pembangunan kewilayahan belum terlihat fokus pada wilayah Sumatera Timur, justru kerjasama dengan pihak luar negeri seakan menjadi prioritas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya bangun fungsi koordinatif yang baik dan operasional antara pemerintah Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Akhirnya direkomendasikan agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat *leading* dalam inisiatif membentuk lembaga koordinatif dalam upaya mengoptimalkan kerjasama Sumbang, Riau dan Jambi. Kerjasama ini tentunya akan menjadi lebih strategis dalam meningkatkan *bargain* Indonesia dalam forum IMS-IMT GT.

## I. Latar Belakang

Mulai diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tidak terkecuali dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Kewenangan untuk perencanaan pembangunan daerah menjadi fungsi strategis pemerintah daerah yang telah dan akan secara bertahap menggantikan posisi Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kini, arah pembangunan negara riilnya adalah resultan dari perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Kendati demikian, tidak akan mudah bagi pemerintah untuk menyusun suatu rencana pembangunan daerah yang cukup komprehensif agar dapat dijadikan acuan program kerja lokal. Karena ada hal yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan fokus perhatian pada kondisi daerah masing-masing. Dibutuhkan suatu kerjasama antar daerah untuk memberikan bingkai (frame) terhadap rencana program supaya dapat berdasar pada pemahaman wilayah regional, hal yang selama ini taken for granted dari Bappenas.

Didalam UU otonomi daerah, memang kerjasama lintas daerah kabupaten dan kota diatur oleh pemerintah provinsi, akan tetapi kerjasama regional yang melibatkan beberapa provinsi tidak cukup terjelaskan<sup>1</sup>. Padahal sekarang ini kerjasama dalam penyusunan kebijakan pembangunan lintas provinsi justru menjadi lebih penting mengingat relatif kurangnya interaksi regional antar provinsi selama ini selain dari koordinasi yang dilakukan Bappenas secara nasional.

Pemerintah daerah Provinsi Sumbar agaknya tidak harus memulai dari awal untuk bekerjasama dalam lingkup regional yang melibatkan provinsi tetangga. Daerah Sumbar, Riau, dan Jambi telah memiliki aset kesepakatan

---

<sup>1</sup> Pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah hanya disebutkan "kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya".

terjasama yang bahkan Singapura dan Malaysia ikut di dalamnya yaitu: Indonesia, Malaysia and Singapore – *Growth Triangle* (IMS-GT). Wadah kerjasama ini tentu dapat dijadikan wahana untuk memfasilitasi upaya koordinasi sub kepentingan antara Sumbar, Riau, dan Jambi. Apalagi secara historis ketiga daerah ini pernah tergabung sebagai satu wilayah dalam swatantra Sumatera Tengah. Sehingga adalah lazim pula kiranya membicarakan Sumbar, Riau, dan Jambi sebagai satu kawasan atau regional, Sumatera Bagian Tengah.

Faktor lain yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap rencana kewilayahan area Sumatera Bagian Tengah adalah pertimbangan akan kesetimbangan pembangunan sebagai akibat perbedaan tingkat pendapatan daerah Riau, Sumbar, dan Jambi. Provinsi Riau tahun 1998/1999 saja telah menganggarkan belanja daerah mencapai 359 Milyar Rupiah, sementara Sumbar pada tahun yang sama hanya menganggarkan 166 Milyar Rupiah. Dengan kondisi ini dipastikan dampak ekonomi regionalnya akan sangat luar biasa dan akan berpengaruh terhadap pola dan struktur ekonomi kawasan.

## **2. Perumusan Masalah**

Ditetapkannya UU No 22 dan 25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan pada skala paradigmatis dalam sistem pemerintahan daerah. Daerah kota dan kabupaten, dulu disebut dengan Daerah Tingkat II kabupaten dan kotamadya, tidak lagi memiliki hubungan hirarkis dengan daerah provinsi. Artinya pemerintah provinsi terhadap daerah kota dan kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengintervensi setiap kebijakan, karena pemerintah kota dan kabupaten hanya bertanggung jawab kepada DPRD setempat.

Sehingga memang keberadaan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom adalah memfasilitasi bidang pemerintahan lintas kota dan kabupaten serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kota dan kabupaten. Sedangkan sebagai daerah administrasi pemerintah provinsi menyelenggarakan kewenangan bidang

pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka otonomi<sup>2</sup>.

Dengan pembatasan-pembatasan kewenangan provinsi pasca otonomi menyebabkan eksistensi pemerintah provinsi terhadap unit-unit otonom dalam lingkup ruang harus berfokus pada kemampuan untuk mengadakan koordinasi kebijakan lintas kabupaten/ kota, dan lintas provinsi.

Kepentingan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi untuk mengadakan koordinasi kebijakan menjadi sangat utama berkenaan dengan adanya faktor-faktor yang menjadi potensi dan peluang untuk diakselerasikan perkembangannya secara bersama-sama. Tidak saja karena memiliki kemiripan setting sejarah, sosial, budaya, namun dalam segi yang lebih fungsional memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dalam kerangka kawasan ketika Riau berpotensi untuk mendorong perkembangan wilayah dengan meningkatnya pendapatan daerahnya pasca UU No. 25 tahun 1999.

Pada tahun awal pelaksanaan otonomi daerah akan menjadi sangat menarik bagi kita untuk menyidik adaptasi perilaku pemerintah provinsi terhadap kewenangan yang baru dimilikinya. Sehingga apakah dengan keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah justru menjadi sangat menutup diri terhadap lingkungannya atau sebaliknya mulai mengembangkan ruang kebijakan dengan menjalankan langkah koordinatif antar propinsi.

Berdasar latar belakang dan uraian dalam perumusan masalah dapat diangkat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Apakah didalam produk rencana pembangunan daerahnya, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memiliki orientasi pembangunan yang berwawasan kewilayahan khususnya terhadap Sumatera bagian Timur?
2. Bagaimanakah kecenderungan orientasi pemerintah daerah Sumatera Barat terhadap wilayah Sumatera bagian Timur?

---

<sup>2</sup> Lihat penjelasan UU No. 22 Tahun 1999

### 3. Tinjauan Pustaka

Perubahan yang sistematis dalam paradigma pembangunan Indonesia di masa depan adalah hal yang terpenting dengan dikeluarkannya UU otonomi daerah. Perubahan paradigma pembangunan dengan dikeluarkannya UU otonomi daerah menurut Emil Salim meliputi:

*pertama, dari sentralisasi pemerintahan di tingkat pemerintah pusat kepada desentralisasi dengan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Kedua, pola pengambilan keputusan dari atas menjadi di bawah. Ketiga, dari pendekatan pembangunan sektoral ke pembangunan regional holistik. Keempat dari pembangunan dengan wilayah negara yang dominan ke wilayah masyarakat madani (civil society sphere). Kelima, dari pola pembangunan yang berorientasi pada ekonomi ke pola pembangunan yang menyeluruh total ekonomi-sosial-politik-budaya-dan agama<sup>3</sup>*

Kondisi yang dipaparkan pada kutipan diatas mestinya menjadi syarat dalam perencanaan pembangunan daerah di masa depan. Hal yang paling menarik adalah pergeseran pendekatan pembangunan sektoral menjadi pembangunan regional holistik. Pembangunan sektoral yang berorientasi proyek yang perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan, serta pengawasannya berasal dari pusat harus digantikan dengan pendekatan regional.

Pembangunan dengan cara pandang regional tidak dimaksud sesederhana untuk menambah pendapatan daerah, tapi lebih dimaksud untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi dalam wilayah. Hal ini hanya dimungkinkan dengan pengamatan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh wilayah dalam kawasan untuk selanjutnya mempermudah penggalan peluang-peluang dalam produksi, dan penyediaan jasa, dan mobilitas penduduk secara lebih efisien dan dilatari pemahaman dinamika sosial, budaya, dan politik lingkup regional<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Emil Salim, Otonomi dan Masalahnya dalam Otonomi atau Federalisme, 2000, suara Pembaruan, Jakarta, Hal. 109.

<sup>4</sup> Implikasi pembangunan regional lebih lanjut dapat dilihat dalam Avrom Bendavid-Val, 1991, Hal 15-16

Meningkatnya pendapatan dan belanja provinsi Riau secara drastis tentunya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dana dalam jumlah yang sangat besar itu tentunya dapat diinvestasikan menjadi infrastruktur dan prasarana industri baru pada daerah-daerah dalam provinsi Riau. Kemajuan Riau dapat menjadi faktor pendorong pembangunan regional dalam Sumatera Tengah.

Persoalannya sekarang ini adalah apakah terdapat suatu jalinan koordinasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kendati kita ketahui bahwa dalam jangka panjang koordinasi ini menjadi sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh John Glasson bahwa:

*"... antara tujuan-tujuan ekonomi regional inipun dapat terjadi pertentangan. Dalam hal horizon waktu adalah penting, terutama berkenaan dengan pengalokasian investasi antara daerah "kuat" dan daerah yang "lemah" Investasi preferensial ke daerah-daerah yang "lemah" berdasarkan pertimbangan keadilan dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, karena pengalokasian seperti itu dapat berarti tidak memanfaatkan keuntungan skala ekonomi dari daerah-daerah "kuat". Akan tetapi dalam jangka panjang keadaannya dapat berlainan sama sekali, karena dengan dihilangkannya penghalang-penghalang pertumbuhan di daerah "lemah" dan pencegahan kemungkinan kerugian diseconomies di daerah-daerah yang kuat, tujuan-tujuan yang berbagai macam itu satu sama lain dapat menjadi serasi atau konsisten."<sup>5</sup>*

Memang diperlukan suatu penelitian lebih lanjut untuk dapat mengungkapkan bentuk kerjasama apa yang dapat dikembangkan ketiga daerah. Persoalannya menjadi tidak sesederhana mengkalkulasikan potensi ekonomi regional, namun lebih rumit lagi ketika harus dicermati *setting* sosial, budaya, dan dinamika politik yang berkembang pada wilayah Sumatera Tengah.

Dalam penelitian ini agaknya harus dibedakan dalam mengkategorikan kerjasama sebagai suatu proses berbentuk transaksi antar penduduk Riau, Jambi, dan Sumbar dengan proses-proses yang lebih terinstitusikan dengan pengemukaan peran pemerintah.

---

<sup>5</sup> John Glasson, Pengantar Perencanaan Regional. Terj. Paul Sitohang, 1977, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 13

Dengan menyempitnya ruang intervensi kebijakan pemerintah provinsi terhadap kabupaten dan kota, maka memang kewenangan untuk berkoordinasi menjadi sangat penting. *Bargaining* pemerintah provinsi justru terletak pada kemampuan menyediakan sarana, informasi, dan menawarkan agenda negosiasi yang lebih luas kepada daerah didalam wilayahnya ke daerah di luar.

Dalam acuan penyusunan dokumen pola dasar yang disampaikan melalui Surat Edaran No. 050/829/II/Bangda oleh Departemen Dalam Negeri tahun 2000 kepada para gubernur dijelaskan bahwa:

*"...dalam proses penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi, perlu pula dilakukan koordinasi dan konsultasi fungsional dengan daerah provinsi lainnya dalam rangka mengakomodasikan kerjasama pembangunan antar daerah provinsi secara sinergis."*

Sehingga provinsi harus dapat berkoordinasi agar perencanaan dari masing-masing daerah dapat lebih optimal.

#### **4. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sensitivitas rencana pembangunan daerah Sumatera Barat terhadap perkembangan wilayah Sumatera bagian Timur.
2. Mengetahui beberapa strategi dan langkah kebijakan daerah Sumatera Barat dalam menanggapi perkembangan wilayah Sumatera bagian Timur.
3. Mengevaluasi strategi dan langkah kebijakan rencana pembangunan daerah Sumatera Barat dalam menanggapi perkembangan wilayah Sumatera bagian Timur
4. Memberikan beberapa rekomendasi yang terkait dengan strategi dan langkah kebijakan dalam pembangunan daerah Sumatera Barat dalam keterkaitannya dengan perkembangan wilayah Sumatera bagian Timur

#### **5. Kontribusi Penelitian**

1. Penelitian ini akan bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun langkah koordinasi wilayah Sumatera Tengah secara lebih terpadu.
2. Dari agenda permasalahan yang diangkat dapat dilanjutkan dengan penelitian yang lebih terfokus dalam upaya pemecahan masalah pengkoordinasian pembangunan Sumatera Tengah.



### 5. Metode Penelitian

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan teknik analisis isi terhadap data sekunder.

#### 5.1 Sampling

Didalam penelitian ini secara **purposif** menggunakan dua dokumen Propinsi Sumatera Barat yang dianggap penting dalam menentukan orientasi pembangunan daerah. Yaitu: (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi 2001 - 2005, dan (2) Program Pembangunan Daerah (Propeda) 2001-2005.

Dokumen Pola Dasar merupakan penjabaran dari GBHN dan Proopenas dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah serta seluruh masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun.

Selanjutnya agar penelitian ini lebih akurat maka digunakan pula dokumen Program Pembangunan Daerah (Propeda) 2001-2005 yang sekaligus jabaran dari pola dasar pembangunan daerah 2001-2005. Dokumen Propeda memuat pedoman dalam penyusunan program pembangunan daerah di dalam masing-masing propinsi. Kedua dokumen ini bersifat mengikat karena ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### 6.2 Unit Analisis

Unit sampling adalah bagian dari realitas yang diamati atau bagian dari sejumlah ungkapan bahasa dari dokumen. Yang dijadikan unit pengukuran adalah semua kata, simbol, tema, dan bagian dari dalam dokumen

Analisis isi secara pragmatis dilakukan sehingga proses mengklasifikasikan tanda yang muncul adalah menurut sebab atau akibatnya yang mungkin dikategorikan sebagai sebuah kebijakan dengan orientasi tertentu.

Kategorisasi yang akan digunakan adalah :

1. Indikasi Kewilayahan
2. Indikasi Kerjasama
3. Ekspektasi Kerjasama
4. Tema-tema Kerjasama

### **6.3 Metode Pengukuran**

Mengingat data relevan yang akan dikumpulkan "ternyata" tidak ditemukan secara intensif, dan dalam jumlah yang sangat terbatas, maka penelitian hanya mencari frekuensi item yang termuatkan dalam dokumen.

### **6.4 Kategorisasi**

Wilayah kerjasama yang umumnya ditemukan dalam dokumen adalah dalam kategori:

#### **Indikasi Kewilayahan**

1. Propinsi Tetangga
2. Sumatera Timur
3. Luar Negeri; IMT-IMS GT, ASEAN

#### **Indikasi Kerjasama**

1. Indikatif
2. Imperatif

#### **Ekspektasi Kerjasama**

1. Pembukaan
2. Perluasan
3. Pendalaman

#### **Tema-tema Kerjasama**

1. Sosial
2. Budaya
3. Pariwisata
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Pendidikan
7. Perkebunan dan Kehutanan
8. Transportasi

## 5.5 Operasionalisasi Kategori

Kategori yang dimaksudkan adalah dalam pemahaman berikut:

### 5.5.1 Indikasi Kewilayahan

Propinsi tetangga adalah setiap susunan kata yang mengacu pada wilayah yang berbatasan dengan Sumbar tanpa mengikutkan kata yang spesifik dari prov. Riau atau Jambi.

Sumatera Timur adalah propinsi-propinsi yang berbatasan di sebelah Timur Sumbar, dalam hal ini adalah propinsi Riau dan Jambi.

Sementara Luar Negeri adalah daerah di luar kedaulatan pemerintah RI yang memiliki keterkaitan hubungan dengan Sumbar seperti IMT-IMS GT, ASEAN, dan AFTA.

### 6.5.2 Indikasi Kerjasama

Perencanaan yang dapat digolongkan Indikatif jika hanya memuat petunjuk-petunjuk umum dan sifatnya sebagai sumber acuan

Perencanaan yang dapat digolongkan Imperatif jika telah memuat petunjuk-petunjuk yang sudah bersifat konkret.

### 6.5.3 Ekspektasi Kerjasama

Kerjasama yang diharapkan untuk dimulai dalam suatu kerangka awal dialog peninjauan dikategorikan sebagai **Pembukaan**. Tahapan untuk Menindaklanjuti kerjasama yang sudah dibuka hubungannya adalah tahap **Perluasan**. Untuk meningkatkan hubungan yang sudah ada dengan kombinasi sektor, peningkatan kuantitas, serta indikasi yang lebih serius dikategorikan sebagai **Pendalaman**.

### 6.5.4 Tema-tema Kerjasama

1. Sosial
2. Budaya
3. Pariwisata
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Pendidikan
7. Perkebunan dan Kehutanan
8. Transportasi

ema kerjasama ini adalah sektor dalam pembangunan yang dimaksudkan ntuk dikembangkan. Secara umum indikatornya adalah termuatnya isu-isu dimaksud pada rencana kerjasama.

Impamanya adalah Kerjasama bidang **ekonomi** adalah kerjasama yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal,

kerjasama bidang **pariwisata** adalah kerjasama dalam upaya peningkatan jumlah pengunjung wisata pada masing-masing daerah dengan memanfaatkan potensi wisatawan daerah propinsi Sumatera Timur baik lokal atau mancanegara

Kerjasama bidang **transportasi** adalah upaya kerjasama dalam meningkatkan aksesibilitas daerah segitiga propinsi Sumbar, Riau dan Jambi dengan memanfaatkan moda angkutan darat, dan udara, serta sungai

## 7. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian yang semula dijadwalkan dapat terselesaikan dalam jangka waktu 5 Bulan berakhir pada bulan Oktober 2001 ternyata mengalami keterlambatan karena harus menunggu disyahkannya dokumen yang menjadi informasi utama dalam penelitian, PROPEDA Sumatera Barat 2001-2005.

## 8. Personalia Penelitian

No.	Nama	Gol.	Jabatan	Bid. Ilmu
1.	Yopi Fetrian,S.IP	IIIa	Ketua	Politik
2.	Rico Candra	Mahasiswa	Anggota	Politik
3.	Dra. Ranny Emilia,M.Phil	IIIc	Pembimbing	Politik

## 9. Hasil Penelitian

### 9.1 Pendahuluan

Menjadi sangat berarti bagi kita untuk memperkirakan kesesuaian konteks kekinian perkembangan regional Sumatera Tengah dengan arah perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Sumbar. Untuk itu , Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Sumatera Daerah Sumatera Barat tanggal 6 November 2001

apat dijadikan acuan dalam memperkirakan beberapa kecenderungan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk interval waktu 2001-2005<sup>6</sup>.

Dengan keempat propinsi yang berbatasan wilayahnya, Sumatera Utara, Riau, Jambi Bengkulu, tampaknya Pemerintah daerah Provinsi Sumbar harus menentukan beberapa fokus pengembangan wilayah. Dengan pertimbangan kemudahan akses transportasi, tingkat pertumbuhan, kerjasama yang telah terbangun selama ini maka propinsi Riau dan Jambi harus menjadi perhatian utama untuk arah pengembangan pembangunan di masa depan.

Dari segi kepentingan ekonomi, pemerintah Sumbar harus dengan jeli melihat kecenderungan meningkat drastisnya pembangunan daerah Riau dan Jambi seiring dengan relatif besarnya alokasi dana pembangunan daerah tetangga tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1, APBD pada tahun 1998/1999 propinsi Riau telah mengalami peningkatan hingga 550% sejak tahun 1983/1984. Sementara dengan besaran yang hampir bersamaan hanya mengalami peningkatan 147%. Propinsi Jambi relatif lebih baik dari Sumatera Barat karena berhasil mencapai 230%.

**Tabel 1.**

	APBD Tahun Terakhir PELITA III-VI (dalam juta rupiah)				
	1983/1984	1988/1989	1993/1994	1998/1999	% Kenaikan
Sumut	140.639	240.531	466.710	347.839	147%
Sumbar	66.422	47.980	99.020	165.647	149%
Riau	55.166	69.256	231.830	358.552	550%
Jambi	38.142	30.911	84.130	126.248	230%
Bengkulu	24.896	26.637	61.050	107.827	333%

Sumber : Diolah dari **Pembangunan Daerah Dalam Angka 2000**, Bappenas

<sup>6</sup> Lihat Propeda, hal. 1

Dari segi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1998/1999 Propinsi Riau bersama-sama dengan propinsi Jambi mencatatkan angka yang luar biasa asing-masing 18 Trilyun dan 4.3 Trilyun Rupiah. Sementara Propinsi Sumatera Barat hanya mencatatkan nilai sebesar 665 Milyar Rupiah.

**Tabel 2.**

	Penanaman Modal Asing Tahun Terakhir PELITA III-VI (dalam juta US\$)				
	1983/1984	1988/1989	1993/1994 (I)	1998/1999 (II)	% (I-II) Kenaikan
Sumut	2.098	2.939	4.524	10.364	130
Sumbar	31	64	211	665	215
Riau	343	1.118	1.118	18.227	1530
Jambi	24	24	24	4.331	1704
Bengkulu	0.0	0.0	75	250	233

Sumber: Diolah dari Pembangunan Daerah Dalam Angka 2000, Bappenas

## 2. Analisa Isi

### 2.1 Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 – 2005.

Dari observasi pada teks Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 – 2005 didapatkan beberapa catatan berikut ini.

#### Indikasi Kewilayahan

	Propinsi Tetangga	Sumatera Timur	Luar Negeri
Frekuensi	1	-	3

Artinya, bekerjasama dengan pihak luar negeri, dalam hal ini dalam konteks IMS-MT GT ataupun AFTA, lebih diminati dibandingkan dengan mengembangkan potensi yang ada pada wilayah Sumatera Timur ataupun dengan Sumatera Utara dan Jambi.

#### Indikasi Kerjasama

	Indikatif	Imperatif
Frekuensi		4

erjasama yang dimaksud sudah dalam keinginan untuk ditindaklanjuti pada program yang lebih operasional.

#### Ekspektasi Kerjasama

	Pembukaan	Perluasan	Pendalaman
Frekuensi	-	3	1

erjasama yang ada kebanyakan sudah dibuka dan perlu ditindaklanjuti serta meningkatkan derajat kerjasamanya.

#### Tema-tema Kerjasama

Tema	Frekuensi
Sosial	2
Budaya	1
Pariwisata	-
Ekonomi	3
Lingkungan Hidup	-
Pendidikan	1
Transportasi	-

Motif ekonomi menjadi modus pada tema kerjasama yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Disusul oleh bidang sosial, budaya dan pendidikan

#### 3.2.2 Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumbar Tahun 2001-2005.

Dari observasi atas teks Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Sumatera Barat 2001 – 2005 didapatkan beberapa catatan berikut ini.

#### Indikasi Kewilayahan

	Propinsi Tetangga	Sumatera Timur	Luar Negeri
Frekuensi	5	9	22

Artinya, bekerjasama dengan pihak luar negeri, dalam hal ini dalam konteks IMS-MT GT ataupun AFTA, lebih diminati dibandingkan dengan mengembangkan potensi yang ada pada wilayah Sumatera Timur ataupun dengan Sumatera Utara dan Jambi.

### Indikasi Kerjasama

	Indikatif	Imperatif
Frekuensi	19	16

erjasama yang dimaksud sudah dalam keinginan untuk ditindaklanjuti pada program yang lebih operasional.

### Ekspektasi Kerjasama

	Pembukaan	Perluasan	Pendalaman
Frekuensi	1	7	8

erjasama yang ada kebanyakan sudah dibuka dan perlu ditindaklanjuti serta ditingkatkan derajat kerjasamanya.

### Tema-tema Kerjasama

Tema	Frekuensi	%
Sosial	1	3
Budaya	1	3
Pariwisata	5	14
Ekonomi	18	49
Lingkungan Hidup	3	8
Pendidikan	1	3
Transportasi	2	5
Umum	6	16

Motif ekonomi menjadi modus pada tema kerjasama yang ingin dikembangkan oleh pemerintah hingga mencapai 49%. Disusul oleh bidang pariwisata, dan lingkungan hidup, transportasi, sosial, budaya dan pendidikan



## Interpretasi dan Rekomendasi

### Interpretasi

Secara umum orientasi pembangunan kewilayahan tergambar pada bagian yang disebut sebagai Kerjasama Pembangunan. Koordinasi meliputi sesama luar negeri dan kerjasama antar daerah dan wilayah. Meskipun pada bagian lain dari naskah Propeda perihal kerjasama ini juga disinggung oleh beberapa sektor diantaranya Pembangunan Ekonomi, Penataan Ruang dan Peningkatan Kapasitas Pembangunan Wilayah, serta Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam namun payung dari berbagai faktor yang terkait dengan kerjasama regional adalah pada bagian Kerjasama Pembangunan.

Dari penelitian yang mencoba mengumpulkan dan menganalisis isi setiap bagian yang dapat dikategorikan sebagai program kerjasama pembangunan, terdapat beberapa hal yang amat penting untuk diperhatikan. Diantaranya adalah:

Pertama, identifikasi wilayah kerjasama terlihat belum fokus sehingga seringkali tidak membedakan prioritas mana yang hendak dicapai. Kerjasama dengan kelompok wilayah luas yang digagas dengan konsep pembangunan segitiga Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) ataupun Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT) seringkali terkesan menjadi lebih penting ketimbang kerjasama dengan propinsi tetangga Riau, Jambi, Bengkulu, ataupun Sumatera Utara. Meski dapat dipahami bahwa konsep kerjasama IMS-GT dan IMT-GT sebenarnya melibatkan dampak propinsi tetangga yang tersebutkan tadi namun kenyataannya membuktikan bahwa salah satu misi pembangunan daerah adalah:

*Meningkatkan kerjasama luar negeri, terutama dalam kerangka Segitiga Pertumbuhan dengan negara-negara ASEAN, kerjasama Asia-Kyushu yang telah dirintis selama ini, dan mengembangkan kerjasama internasional lainnya guna mendorong proses pembangunan daerah<sup>7</sup>.*

Ini dibandingkan dengan visi pembangunan ekonomi yang membedakan konsep pembangunan IMS-GT dengan kerjasama dengan propinsi tetangga:

... tercapainya suatu tahap pembangunan ekonomi yang maju berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan saling ketergantungan yang erat dengan propinsi tetangga dan negara anggota IMS-IMT-GT.<sup>2</sup>

dua. tidak adanya bangun fungsi koordinatif yang baik di tingkat propinsi menyebabkan berbagai identifikasi sektor kerjasama seringkali hanya sampai da analisis potensi, tantangan, atau peluang namun luput pada *breakdown* tuk level strategi kebijakan dan program pembangunan.

Selain itu persoalannya menjadi tidak sesederhana mengkalkulasikan tensi ekonomi regional, namun lebih rumit lagi ketika harus dicermati setting sial, budaya, dan dinamika politik yang berkembang pada wilayah Sumatera ngah. Sehingga bangunan koordinatif tersebut dapat memberikan kontribusi ng lebih signifikan ketimbang tidak adanya intervensi dari pemerintah.

tiga, belum terlihat adanya minat untuk menjalankan inisiatif yang lebih jauh ri pemerintah Sumbar sendiri terhadap pembangunan kawasan yang berbatas ngan Riau dan Jambi, bahkan terkesan yang lebih diandalkan adalah Forum erjasama Pembangunan se-Wilayah Sumatera. Padahal sudah disadari bahwa rdapat keunggulan komparatif yang dimiliki propinsi Sumatera Barat.

*Pembangunan kawasan Sumatera Bagian Timur yang relatif tidak sesuai untuk pertanian tanaman pangan, sedikit menyediakan tempat rekreasi alam serta sedikit keragaman bahan tambang merupakan pasar besar bagi pengembangan sektor tersebut diatas*

## 1.2 Rekomendasi

ertama, harus segera dibentuk suatu lembaga koordinatif yang melibatkan tiap *stake holder* yang berkepentingan dalam kerjasama antar wilayah umbar, Riau dan Jambi. Meskipun tanpa kesertaan pemerintah transaksi antar nduduk Riau, Jambi, dan Sumbar dapat terus dapat berjalan, namun dengan oses-proses yang lebih terinstitusikan dan didukung berbagai kebijakan firmative dari pemerintah masing-masing daerah tentunya hasil yang akan dapat berlipat ganda, selanjutnya

dua, pemerintah daerah Sumbar bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat harus *leading* dalam upaya pembentukan lembaga koordinasi tersebut dengan proposal yang sudah sampai kepada acuan teknis, termasuk dalamnya

tiga, pengembangan lebih lanjut dari kesadaran akan perbedaan keunggulan wilayah Sumbar, Riau dan Jambi sehingga memungkinkan terjadinya sinkronisasi dalam pengembangan kualitas produk-produk regional. Pada tingkat yang lebih luas sinkronisasi tersebut dapat memperkuat *bargaining* wilayah antara Timur Sumatera dalam IMS-IMT GT.

empat, forum IMS-IMT GT harus diperhatikan secara strategis sebagai wadah kesepakatan antara negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura. Artinya, kerjasama IMS-IMT GT bukan saja aktualisasi kepentingan masing-masing propinsi yang ada di dalam forum kerjasama segitiga. Sehingga kelima, pemerintah Sumbar harus menepis kesan ataupun gejala yang dapat memicu persaingan yang tidak perlu diantara propinsi Riau, Sumbar dan Jambi. Dengan demikian beberapa rekomendasi ini akan bermanfaat seandainya didalam rencana Pembangunan Tahunan Daerah tahun 2002 diwujudkan dan dapat dilaksanakan.

## 1. Daftar Pustaka

### Daftar Pustaka:

- Wibisono, Iwan Jaya, 1999, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Davidson-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis For Practitioners*, Praeger Publishers, USA.
- Janim, Sudarwan, 1997, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Blasson, John, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, Terj:Paul Sitohang, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Janus Krippendorf, 1993, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj: Farid Vajidi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhandojo, dkk, 2000, *Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu: Sebuah Kajian Eksploratif*, KTPW-BPPT, Jakarta.

**Dokumentasi Lain:**

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2001 dan Lampiran *Program Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2001-2005*.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 1 Tahun 2001 dan Penjelasan tentang *Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 – 2005*

Surat Edaran Depdagri No. 050/829/III/Bangda, *Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah 2000-2005*

Surat Bappenas No. 752/D.V/02/2000, *Kerangka Acuan Penulisan Propenas Bappenas, Pembangunan Daerah Dalam Angka 2000*.

Surat Gubernur Sumatera Barat No. 1108/XII/Set/Bappeda/99, *Penyusunan Pola Dasar*